

SKRIPSI

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DUSUN LANGKOA DESA BOLAROMANG, KECAMATAN TOMBOLO PAO, KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

**AL QUDRI ASMAUL AHMAD
M111 16 533**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI DUSUN LANGKOA DESA BOLAROMANG,
KECAMATAN TOMBOLO PAO, KABUPATEN GOWA

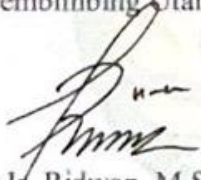
Disusun dan diajukan oleh

AL QUDRI ASMAUL AHMAD
M111 16 533

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan, Fakultas
Kehutanan, Universitas Hasanuddin
pada tanggal 15 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Ridwan, M.SE
NIP. 19680112199403 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S
NIP. 19590420198503 1 003

Ketua Program Studi,



Dr. Forest Muhammad Ali K. S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Qudri Asmaul Ahmad
NIM : M111 16 533
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

Kontribusi Sektor Kehutanan pada Perekonomian Masyarakat Dusun Langkoa,
Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2021

Yang menyatakan



Al Qudri Asmaul Ahmad

ABSTRAK

Al Qudri Asmaul Ahmad (M11116533). Kontribusi Sektor Kehutanan pada Perekonomian Masyarakat Dusun Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa di bawah bimbingan Ridwan dan Syamsu Alam.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah dari total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu produktivitas ekonomi dalam suatu wilayah pada satu periode. PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp 504,75 triliun selama tahun 2019. Perhitungan PDRB akan memberikan gambaran ringkas tingkat kemakmuran, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk akan diperoleh PDRB per kapita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur sektor ekonomi, mengetahui kontribusi sektor kehutanan pada total output masyarakat, dan mengetahui output setiap sektor ekonomi di Dusun Langkoa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi literatur. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan rumus PDRB dengan metode pendekatan nilai tambah yaitu dengan menjumlahkan semua nilai tambah pada semua sektor kemudian menghitung pendapatan perkapita dengan membagi total nilai tambah dengan jumlah penduduk dusun. Terakhir yaitu menghitung persentase kontribusi sektor dengan membagi output setiap sektor dengan total output semua sektor dan dikalikan seratus persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Dusun Langkoa terdiri dari enam sektor yaitu sektor kehutanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perdagangan dan sektor jasa. Sektor kehutanan di Dusun Langkoa berkontribusi sebesar 5% atau sejumlah Rp 87.973.280 pada perekonomian masyarakat dari total output sebesar Rp 1.755.968.829. Adapun pada sektor yang lain yakni sektor pertanian dengan total output Rp 1.061.250.569 atau sebesar 60%. Kemudian sektor jasa dengan total output sebesar Rp 346.572.000 atau 20%. Selanjutnya total output Rp 143.585.920 atau sebesar 8% berasal dari sektor peternakan. Pada sektor perkebunan total outputnya adalah sebesar Rp 96.915.860 atau 6% dan terakhir oleh sektor perdagangan sebesar Rp 19.671.200 atau 1%.

Kata kunci: kontribusi, nilai tambah, PDRB, struktur ekonomi, sektor kehutanan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontribusi Sektor Kehutanan pada Perekonomian Masyarakat Dusun Langkoa, Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga pada saat penyusunan skripsi ini selesai. Maka dari itu, berikut penulis haturkan ucapan-ucapan syukur kepada pihak-pihak yang terlibat.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati yaitu Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.SE** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada pihak-pihak yang membantu serta memotivasi penulis dalam proses yang sangat panjang ini, yaitu:

1. Bapak **Dr. H. A. Mujetahid M., S.Hut.M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin serta seluruh **Dosen Pengajar** beserta seluruh **Staf Admisnistrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung
2. **Keluarga besar Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** khususnya kepada Ibu **Makkarennu, S.Hut. M.Si. Ph.D**, Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P** dan **Alm. Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P** atas pelajaran-pelajaran yang sangat bermakna untuk penulis
3. **Kawan-kawan L16NUM** yang selalu membantu dan menghibur Penulis di setiap waktu khususnya **sobat KodeLima** yang terkasih

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat persembahkan. Namun penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang mana hal itu didasari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Sebagai akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya untuk penulis sendiri.

Makassar, April 2021

Al Qudri Asmaul Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah	4
2.2 Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Nasional	6
2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6
2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Coklat	7
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Hijau	7
2.3.3 PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku	8
2.3.4 Konsep Perhitungan dan Data Produk Domestik Bruto.....	9
2.4 Keadaan Umum Lokasi	12
2.4.1 Keadaan Geografis Desa Bolaromang	12
2.4.2 Kependudukan	13
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2 Jenis Data.....	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Analisis Data	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1 Struktur Ekonomi Dusun Langkoa	18
4.1.1 Sektor Pertanian	18
4.1.2 Sektor Jasa	19
4.1.3 Sektor Peternakan	20
4.1.4 Sektor Perkebunan	20
4.1.5 Sektor Kehutanan	20
4.1.6 Sektor Perdagangan	21
4.2 Output setiap Sektor Ekonomi dalam Pendapatan Masyarakat Dusun Langkoa	23
4.2.1 Sektor Pertanian	23
4.2.2 Sektor Jasa	24
4.2.3 Sektor Peternakan	25
4.2.4 Sektor Perkebunan	25
4.2.5 Sektor Kehutanan	26
4.2.6 Sektor Perdagangan	27
4.3 Kontribusi Pendapatan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Masyarakat.....	29
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Data Jenis Mata Pencaharian Tahun 2019	14
Tabel 2.	Ragam Sektor Ekonomi Masyarakat Dusun Langkoa Tahun 2020	22
Tabel 3.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Pertanian Dusun Langkoa Tahun 2019	23
Tael 4.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Jasa Dusun Langkoa Tahun 2019 ...	24
Tael 5.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Peternakan Dusun Langkoa Tahun 2019.....	25
Tabel 6.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Perkebunan Dusun Langkoa Tahun 2019.....	26
Tabel 7.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Kehutanan Dusun Langkoa Tahun 2019.....	27
Tabel 8.	Komoditi Pembentuk Output Sektor Perdagangan Dusun Langkoa Tahun 2019.....	28
Tabel 9.	Total Output Nilai Tambah Bruto Semua Sektor tahun 2019	28
Tabel 10.	Jumlah Kontribusi Setiap Sektor dengan Persen Tahun 2019	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Lokasi Wilayah.....	13
Gambar 2.	Diagram Persentase setiap Sektor Ekonomi.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Daftar Pertanyaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat	36
Lampiran 2.	Daftar Responden Dusun Langkoa.....	40
Lampiran 3.	Tabel Input-Output Sektor Perekonomian Masyarakat Dusun Langkoa	50
Lampiran 4.	Dokumentasi Kegiatan Selama di Lapangan.....	51

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan berbeda di setiap negara, khususnya antar negara maju dengan negara berkembang, seperti Indonesia. Di negara-negara maju sebagian besar hutannya untuk lahan pertanian dan kegiatan lain, hutan yang tersisa tidak lagi dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Sementara itu, di Indonesia yang memiliki lahan pertanian terbatas, hutan terus menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan (Puspitojati, 2015).

Sumber daya hutan mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk pembangunan nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya lahir juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang undang-undang pokok kehutanan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasinya, lahirlah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan serta berbagai insentif ekonomi dalam pengusahaan hutan sehingga merangsang tumbuhnya usaha bidang kehutanan khusus dalam bentuk HPH di Indonesia (Negara, 2010).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah dari total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu produktivitas ekonomi dalam suatu wilayah pada satu periode. Produk sektor kehutanan dapat berkontribusi terhadap PDB nasional, dimana hasil hutan berupa kayu hutan, rotan, daun, buah, dan lain-lain yang sifatnya ekstraktif; dan yang sifatnya non-ekstraktif berupa rekreasi dan wisata hutan yang mana dapat dipasarkan, sehingga sebagai bagian dari kegiatan sektor perekonomian nasional kontribusinya dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah (Nurrochmat, 2008).

Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan merupakan perbedaan nilai suatu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi hasil hutan (Nurrochmat, 2008). Metode pengeluaran yaitu menilai

PDRB dengan menjumlah pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Perhitungan PDRB akan memberikan gambaran ringkas tingkat kemakmuran, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk akan diperoleh PDRB per kapita. Makin tinggi angka PDRB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi (Prathama, 2001).

Mengutip dari Rahman dan Chamelia (2015), Nasution (2010) menyebutkan beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2020) menyebutkan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan yang dilihat berdasarkan data PDRB mencapai Rp 504,75 triliun selama tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan bertumbuh cukup baik. Salah satu sektor yang mendominasi ialah pertanian dan kehutanan. Hutan Rakyat yang berada di Desa Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa termasuk sebagai wilayah yang juga menyumbang angka dalam PDB nasional. Dalam hal ini, diperlukan analisis perekonomian untuk mengetahui besaran output di beberapa sektor yang menjadi variabel perhitungan PDRB maupun besaran kontribusi yang diciptakan oleh Desa Bolaromang.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui struktur sektor ekonomi wilayah Dusun Langkoa.
- b. Mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap total output masyarakat di Dusun Langkoa.
- c. Mengetahui output ekonomi setiap sektor di Dusun Langkoa

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai perhitungan PDRB
- b. Dapat menjadi sumber data dalam menilai pertumbuhan ekonomi, khususnya di Dusun Langkoa

- c. Dapat dijadikan acuan dan sumber tambahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses pengelolaan sumber daya yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat yang membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses ini mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru, serta identifikasi pasar-pasar baru. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, agar tujuan itu tercapai maka diperlukan inisiatif pembangunan daerah oleh pemerintah bersama dengan masyarakat (Siwu, 2019).

Dasar dari pembangunan ekonomi sebenarnya ialah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Dalam pengimplementasiannya, pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan keseimbangan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Aryad, 1999:116):

1. Teori ekonomi neo klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
2. Teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya

lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis: sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non-basis: sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

3. Teori lokasi, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.
4. Teori tempat sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
5. Teori kausasi kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai *backwash effects*.
6. Teori daya tarik industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

Suharmi (2018) menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan

masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

2.2 Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Nasional

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, dengan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan penerimaan pemerintah, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor kehutanan dalam penerimaan devisa pada tahun 1992 - 1997 tercatat sebesar US\$ 16,0 milyar, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional (Badan Pusat Statistik, 2000). Meskipun kontribusi sektor kehutanan terhadap total nilai tambah nasional (Produk Domestik Bruto) menurun dari 4,3 persen pada tahun 1993 menjadi 2,3 persen pada tahun 2002, namun nilai tambahnya meningkat dari Rp.14,1 triliun menjadi Rp. 36,2 triliun (Ulya dan Yunardy, 2006).

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2012), kontribusi sektor Kehutanan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa sehingga mereka mempunyai daya beli yang tinggi, meningkatkan konsumsi rakyat di pedesaan yang memberikan kontribusi pertumbuhan sekitar 4% dari pertumbuhan Nasional sekitar 6,5%. Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat (Ulya dan Yunardy, 2006).

2.3 Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

Terdapat dua hal yang menjadi indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto dalam skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam skala regional. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Putra, 2013).

2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Coklat

PDRB yang selama ini dihitung dan diterbitkan di semua Kabupaten, Kota mau- pun Provinsi masih bersifat konvensional dan disebut PDRB Coklat atau PDRB Kon- vensional, karena hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tanpa memasukkan dimensi lingkungan didalamnya (Suparmoko, 2008). PDRB coklat merupakan salah satu indikator dan alat ukur proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, namun pada PDRB coklat ini belum memasukkan unsur sumberdaya alam dan lingkungan dalam perhitungannya secara ekonomis (Waluyati, dkk, 2010).

Berdasarkan hal di atas, PDRB coklat mengandung banyak kelemahan, diantaranya: a) hanya meng- hitung produk-produk yang dipasarkan, b) kehilangan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan belum dianggap sebagai biaya produksi, bahkan c) biaya perbaikan ling- kungan yang rusak dianggap sebagai men- ciptakan nilai tambah. Maka dari itu PDRB coklat harus disempurnakan dengan memperhitungkan penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga akhirnya diperoleh nilai PDRB Hijau atau PDRB yang ramah lingkungan (Suparmoko, 2008).

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Hijau

PDRB Hijau merupakan konsep penemuan yang menginterasikan aspek lingkungan kedalam pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Perhitungan PDRB Hijau menyangkut pautkan deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Deplesi sumber daya alam adalah bekurangnya atau adanya penyusutan sumber daya alam yang tersedia, sedangkan degradasi ialah menurunnya fungsi atau kemampuan suatu lingkungan dalam menyediakan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian. Dari dua hal tersebut apabila digabungkan maka dinamakan Depresiasi Hutan (Rumita dan Nur, 2020).

Secara teoritis, penghitungan PDRB Hijau sangat sederhana yang dinyatakan ke dalam rumus: $PDRB \text{ Hijau} = PDRB \text{ Coklat} - \text{deplesi sumber daya alam} - \text{degradasi lingkungan}$. Tetapi dalam prakteknya ditemui banyak kesulitan, dan kesulitan terbesar adalah pada pemberian nilai ekonomi (valuasi ekonomi) pada jasa lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya (Yani, 2019):

- a. Nilai lingkungan sangat beragam dan secara umum bersifat intangible;
- b. Dampak lingkungan biasanya terjadi dalam jangka panjang;
- c. Lingkungan dianggap sebagai barang publik (public good) atau sumber daya milik umum (common resource) sehingga hak kepemilikan (property right) tidak dapat didefinisikan dengan jelas;
- d. Adanya aspek eksternalitas (negative) pada lingkungan.

2.3.3 PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (*at currebnt Prince*) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan menurut BPS dalam Mursidah (2015) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai dalam unit produksi dalm proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atau ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya (Mursidah, 2015).

Perhitungan atas dasar konstan (*at constant Prince*) menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga satu tahun dasar tertentu. Pada perhitungan atas dasar harga konstan ini, faktor inflasi dihilangkan. Perhitungan atas harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Atau menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam

Mursidah (2015) pengertian produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefenisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui produk domestik regional bruto riilnya.

2.3.4 Konsep Perhitungan dan Data Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan penjumlahan dari nilai tambah produk akhir barang dan jasa keseluruhan sektor yang dihasilkan di wilayah domestik suatu prekonomian negara dalam kurun waktu tertentu. Untuk menghitung angka-angka produk dapat digunakan tiga metode perhitungan. Pertama, PDB dapat dilihat pada penjumlahan imbalan dari faktor produksi yang dimiliki rumah tangga (seperti upah/gaji dan sewa) yang bisa terlihat pada pasar faktor produksi beserta keuntungan dari pelaku usaha. Kedua, PDB bisa juga dilihat pada penjumlahan nilai pengeluaran/konsumsi barang dan jasa akhir yang dinikmati dalam rumah tangga, pemerintah, dan konsumen pasar barang dan jasa luar negeri. Ketiga, perhitungan PDB dengan nilai tambah berkaitan dengan aktivitas perusahaan dalam melakukan produksi dan nilai tambah yang didapatkan dengan mengurangi input antara dari total output, didistribusikan dalam bentuk pendapatan pemilik tenaga kerja berupa upah di sektor produksi tersebut serta untuk pemilik modal berupa sewa di sektor produksi tersebut (Panennungi dan Xu, 2017).

Pendekatan PDB dari Sisi Nilai Tambah

Nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian secara total tidak bisa secara langsung dipakai untuk mengukur PDB karena di dalamnya ada masalah perhitungan ganda dengan nilai produksi suatu barang yang bisa saja sudah dihitung pada barang sebelumnya. Karena itu, diadakan konsep nilai tambah (*value added*) yang merupakan nilai output barang dan jasa total dikurangi nilai barang dan jasa input antara (*intermediate goods and service*). Penjumlahan nilai tambah ini akan sama dengan nilai produk akhir (*final goods and service*) (Panennungi dan Xu, 2017).

Nilai tambah didapatkan dengan mengurangi nilai produksinya dengan nilai produksi tahap selanjutnya, sebagai contoh, dari papan menjadi kayu didapatkan nilai tambah 700, dalam hal ini 800 adalah nilai produksi (output) dari papan dengan input antara kayu (100). Nilai tambah ini merupakan pendapatan yang akan dibayarkan kepada faktor produksi primer dalam hal ini pemilik tenaga kerja (pekerja) untuk upah/gaji dan pemilik alat-alat kerja untuk sewa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air bersih
5. Sektor konstruksi
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan
9. Sektor jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Pendekatan PDB dari Sisi Pengeluaran

Pendekatan perhitungan PDB dari sisi pengeluaran merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam analisis makroekonomi. Secara umum PDB sisi pengeluaran terdiri dari Konsumsi (Consumption atau C), Investasi (Investment atau I), Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure atau G), Ekspor (Export atau E), dan Impor (Import atau M) (Panennungi dan Xu, 2017):

$$PDB = Y = C + I + G + X - M$$

Lebih lanjut, PDB dalam publikasi data statistik, umumnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan rumus sebelumnya untuk komponen PDB, dimana ada tambahan berupa inventori dan diskrepansi statistik. Adapun model rumus tersebut adalah sebagai berikut (Panennungi dan Xu, 2017).

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Keterangan:

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ <i>Inventori</i>	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Pendekatan PDB dari Sisi Pendapatan

Perhitungan PDB dengan menggunakan pendekatan sisi pendapatan merupakan pendekatan yang paling jarang ditemukan dalam analisis makroekonomi. Salah satu faktor penyebabnya adalah data untuk pendapatan tidak tersedia setiap tahun. Sumber yang sering dipakai untuk mendapatkan PDB dari sisi pendapatan adalah data dari Tabel Input Output Indonesia yang diterbitkan sekali dalam lima tahun. Secara sederhana PDB sisi pendapatan adalah Pendapatan Tenaga Kerja (Upah/Gaji) + Pendapatan Sewa Modal + Keuntungan + Lainnya. Namun, dalam Tabel Input Output Indonesia biasanya hanya dibagi dua, yaitu pendapatan tenaga kerja (upah/gaji) serta surplus usaha (selain upah/gaji) (Panennungi dan Xu, 2017).

PDRB sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain (Endang, 2018):

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

2.4 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

2.4.1 Keadaan Geografis Desa Bolaromang

Desa Bolaromang secara geografis berada di ketinggian antara 700-1.250 dpl (diatas permukaan laut) dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50 °C. Secara administrasi Desa Bolaromang terletak di Wilayah Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan luas wilayah 20 Ha yang merupakan salah satu desa dari 8 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao. Wilayah Desa Bolaromang secara administrasi dibatasi oleh wilayah kabupaten serta desa tetangga yaitu sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balassuka dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanreapia. Luas wilayah Desa Bolaromang adalah 11,5 km² dengan total 3 dusun yaitu Lappara'na, Bolaromang dan Langkoa (Pemkab Gowa, 2019).



Gambar 1. Peta Lokasi Wilayah

Menurut RPJM Desa Bolaromang dalam Utama (2017) wilayah Desa Bolaromang secara umum mempunyai ciri khas geologis berupa daerah daratan meliputi perumahan rakyat, lahan pertanian dan hutan lindung dan hutan Rakyat.dan hutan yang didominasi oleh jenis pohon Pinus ,spatu dea, Equaliftus, Bayam Jawa, Kayu Raja dan Rotan dan masih banyak jenis kayuan lainnya. Selain itu, kondisi alam Desa Bolaromang yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta hutan yang masih asri. oleh karena itu, Desa Bolaromang sangat cocok sebagai tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki modal besar untuk menanamkan modalnya baik di bidang pertanian maupun peternakan.

Wilayah Desa Bolaromang terdapat kawasan hutan lindung dengan luas 100 ha dan hutan rakyat seluas 60 ha, dimana hutan tersebut merupakan sumber mata air dan area perkebunan berupa tanaman keras seperti Cengkeh,kopi,nangka dan lain-lain. Di Desa Bolaromang secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun tanaman jangka panjang (Utama, 2017).

2.4.2 Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan, jumlah penduduk Desa Bolaromang pada tahun 2019 sebanyak 945 jiwa dengan jumlah laki-laki 514 jiwa

dan perempuan 431 jiwa. Jumlah kepala keluarga adalah 245 jiwa dan yang tergolong tidak mampu berjumlah 32 orang.

Berikut adalah tabel data jenis mata pencaharian penduduk Desa Bolaromang pada tahun 2019 berdasarkan data dari pemerintah setempat.

Tabel 1. Data Jenis Mata Pencaharian Tahun 2019

No.	Jenis Mata Pencaharian	Dusun			Total
		Lappara'na	Bolaromang	Langkoa	
1	Petani	66	69	43	178
2	Buruh tani	18	2	6	26
3	Pegawai Negeri Sipil	2	1	1	4
4	Polri	-	-	1	1
5	TNI	1	-	-	1
6	Karyawan Swasta		-	-	-
7	Pensiunan Veteran RI	2	-	-	2
8	Tenaga Honorer	5	8	5	18
9	Pedagang	12	4	3	19
10	Tukang Batu	6	8	2	16
11	Tukang Kayu	4	8	-	12
12	Tukang Servis/Bengkel	-	1	-	1
13	Tukang Las Listril/Karbit	-	-	-	-
14	Kios Barang Campuran	6	6	3	15
15	Warung Kopi	-	-	-	-
16	Buruh Bangunan	-	-	-	-
17	Ibu Rumah Tangga	90	73	41	204
18	Tidak Bekerja	21	27	24	72
Jumlah		233	207	129	569

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor perekonomian Desa Bolaromang terbagi atas beberapa sektor yaitu sektor perdagangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan.